



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 11 Februari 2017

Halaman: 4

Raperda Menara Telekomunikasi Selesai Dievaluasi

YOGYA (MERAPI) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Menara Telekomunikasi akhirnya selesai dievaluasi Pemda DIY. Dalam waktu dekat raperda itu akan diajukan untuk disahkan. Raperda Menara Telekomunikasi adalah salah satu raperda yang belum dituntaskan pada tahun lalu. Peraturan itu akan mengatur zonasi pendirian menara telekomunikasi seluler agar lebih tertata.

"Kami sudah menerima hasil evaluasi gubernur terkait raperda menara ini. Kami di pansus sedang tahap finalisasi," kata Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi, DPRD Kota Yogyakarta, Agung Damar Kusumandaru, Jumat (10/2).

Menurutnya, di internal pansus sudah tidak ada persoalan terhadap materi raperda menara telekomunikasi itu. Dalam raperda itu akan mengatur zonasi pendirian menara seluler. Lantaran ada zonasi itu secara teknis pendirian menara harus menyesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang di kota.

"Kalau di pansus sudah ada kesepakatan akan kami ajukan ke pimpinan untuk disahkan dalam rapat paripurna," imbuhnya.

Dia menilai zonasi itu penting karena selama ini marak pendirian menara seluler ilegal. Bahkan di ruang publik seperti trotoar. Dari sisi regulasi, pemerintah pusat memi-

liki surat keputusan bersama tiga menteri dan satu badan yang mendukung perkembangan pendirian menara seluler. "Kami lakukan advokasi ke kementerian terkait dan provider juga kami undang untuk memberikan masukan terhadap raperda menara ini," tambah Agung.

Untuk menara seluler yang tak berizin, dia menilai harus tetap ditertibkan. Terutama di tempat publik yang mengganggu kepentingan publik seperti di trotoar dan taman. Agar jumlah menara seluler tidak bertambah banyak, para pengembang diharapkan menggunakan menara bersama.

Sebelumnya Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti menyebutkan 4 raperda yang belum disahkan di tahun 2016 menjadi prioritas diselesaikan pada triwulan pertama tahun ini. Empat raperda yang belum selesai di tahun 2016 adalah Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Menara Telekomunikasi, Pencabutan Perda dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Raperda KTR telah disahkan beberapa hari lalu dan Raperda Disabilitas masih dalam pembahasan.

"Untuk Raperda Pencabutan Perda sebenarnya pembahasannya sudah selesai di pansus. Tinggal menunggu fasilitasi dari provinsi," kata Bambang. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005